

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BADAN KESBANG DAN POLITIK
Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak 956

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat tersusun sesuai jadwal.

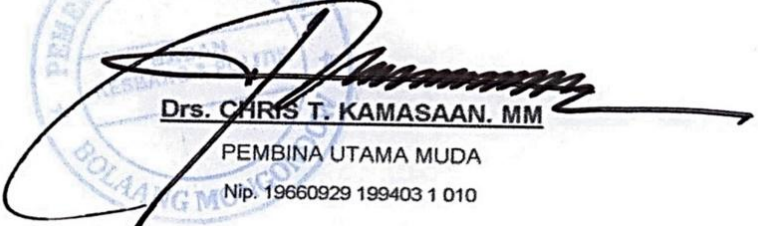
Laporan ini disusun dengan mendasar pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2025-2026 dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Bupati Bolaang Mongondow atas amanah yang telah diberikan dalam urusan penunjang di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik. Isi laporan ini menunjukkan gambaran sejauh mana kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025.

Meskipun segala upaya telah dilakukan namun laporan ini masih jauh dari harapan. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai upaya kami menuju kesempurnaan LKIP ini.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 kami sampaikan untuk diperiksa. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya laporan ini, semoga dapat memberi manfaat, amien.

Lolak, Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kab. Bolaang Mongondow

KEPALA BADAN KESBANGPOL



Drs. CHRIS T. KAMASAAN. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19660929 199403 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN	6
BAB I	
1.1 Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6
1.2 Permasalahan Utama Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	14
2.4 Rencana Kinerja Tahunan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan Atas Capaian Kinerja Organisasi	57
4.2 Saraan Tindak Lanjut	58
LAMPIRAN	
Lampiran I. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Lampiran II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025	
Lampiran III. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025	
Lampiran IV. RENCANA AKSI TAHUN 2025	
Lampiran V. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025	
Lampiran VI. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BOLAANG MONGONDOW

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow adalah unsur perangkat daerah yang bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan kedudukan susunan organisasi serta menjalankan fungsi organisasi serta dapat melaksanakan dan merumuskan kebijakan serta menjalankan administrasi sesuai tugas dan tanggungjawab. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan.

Pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2025-2029.

dituangkan dalam Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, Laporan Kinerja ini juga merupakan umpan balik untuk memperbaiki kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

1.1.1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow terbentuk sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, dan telah ditetapkan kedudukan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesbang dan Politik Tipe C. Terdiri Dari :

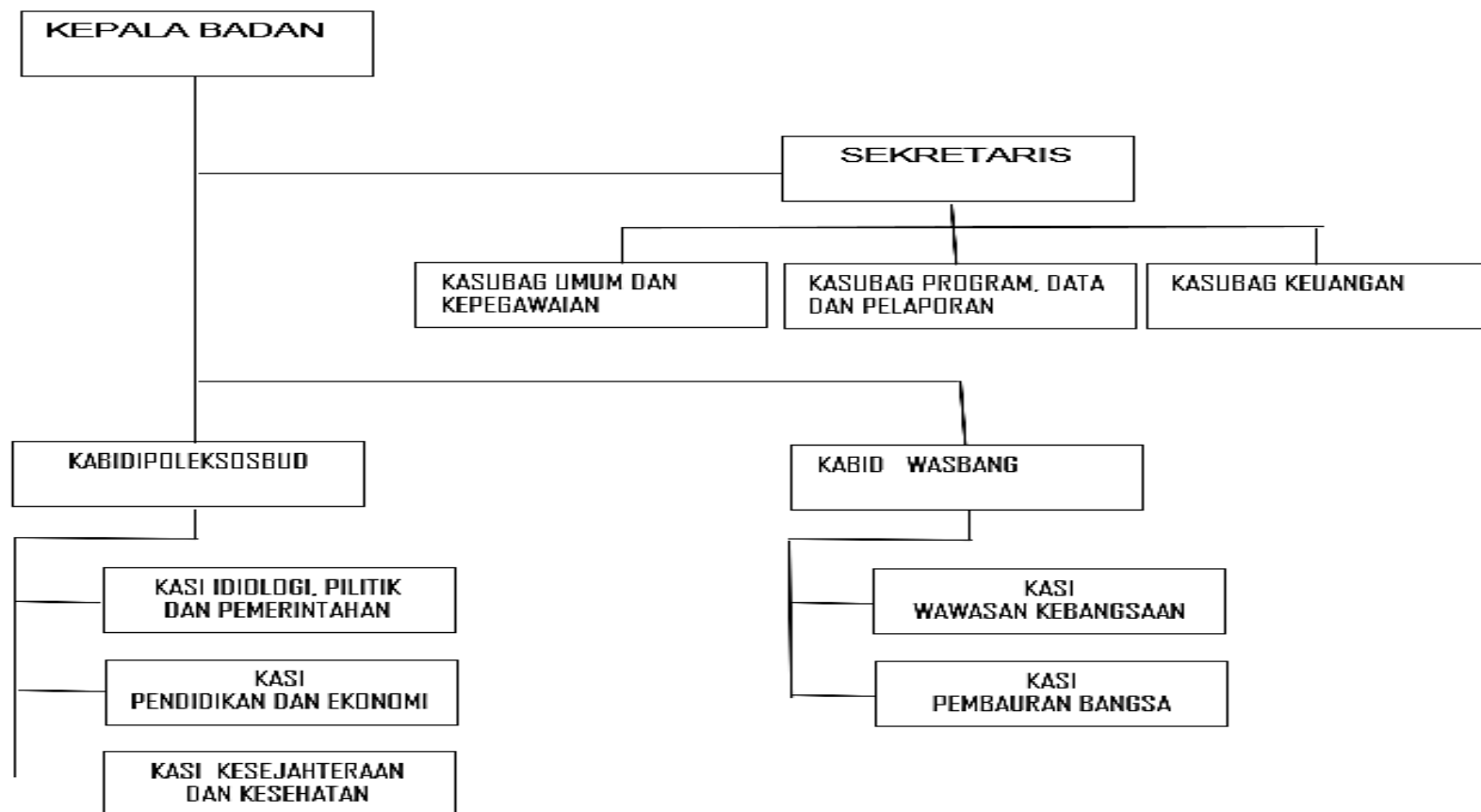
1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan Membawahi 1 (satu) sub bagian, dan 1 (satu) Pejabat Fungsional yaitu:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Perencana

1.1.2. Jabatan Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan fungsional terdiri atas :

No	JABATAN	ESELON		DIKLAT PIM	
		TINGKAT	JUMLAH	TINGKAT	JUMLAH
1	Kepala Badan	II/b	1	II	--
2	Sekretaris	III/a	1	III	--
3	Kepala Bidang	III/b	2	III	--
4	Kasubag/Kepala Seksi	IV/a	0	IV	0
5	Fungsional		7		
6	Staf		10	--	--
Total :			21		0

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025



1.2. PERMASALAHAN UTAMA BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow menghadapi berbagai permasalahan.

Berikut ini beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
3. Masih minimnya alokasi anggaran
4. Kurangnya pembinaan kepada masyarakat di daerah wilayah rawan konflik
5. Masyarakat politik yang emosional dan sangat tidak disiplin yang di perparah lagi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat rendah
6. Kurangnya aparatur yang mengikuti diklat/bimtek intelegen serta tidak didukungnya sarana prasarana yang memadai
7. Minimnya ketersediaan penunjang operasional

ISU STRATEGIS :

- 1 Situasi Kesatuan dan kesatuan bangsa serta kewaspadaan dini terjaga
2. Situasi Politik yang menjadi sangat kondusif dan stabil politik kedepan menjadi aman dan terkendali

- 3 . Aparatur yang kompeten didukung sarana prasarana yang memadai
- 4 Terpenuhinya kebutuhan operasional yang mendukung tugas pokok dan fungsi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow dari tahun 2018 - 2023 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, telah baik namun belum mencapai suatu kinerja pelayanan yang optimal, telah diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja pelayanan yang optimal tersebut.

Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
 - b. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan masih terbatas;
 - c. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten satu sama lain menyebabkan kerancuan dan lemahnya landasan bagi penyelenggaraan pelayanan;
 - e. Standard Operating Procedures (SOP) penyelenggaraan pelayanan yang belum seutuhnya tersedia;
- Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur Badan/Kantor Kesatuan Bangsa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow:

Berdasarkan RPD Kabupaten Bolaang Mogondow maka Visi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2026-2027 adalah

“Bolaang Mongondow yang baru, berbudaya, berdaya saing dan Mandiri Sebagai Lumbung Pangan Indonesia timur”

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2026 – 2027 tersebut dirumuskan melalui 5 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Bolaang Mongondow yang berbudaya dan berdaya saing.
2. Mewujudkan pembangunan.
3. Mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri bertumpu pada potensi sumberdaya lokal.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik , Bersih, Demokratis dan Bebas KKN.
5. Mewujudkan Bolaang Mongondow Sebagai Lumbung Pangan Di Indonesia Bagian Timur.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah Badan Kesbang dan Politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	MENINGKATKAN KONDUSIFITAS DAERAH	Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98%

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai tindak lanjut komitmen Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Bolaang Mongondow untuk melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang tertuang dalam RPD dan dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025-2026, maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bolaang Mongodnow dengan Bupati Bolaang Mongondow dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2025:

Tabel 2.2.
Revisi Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM PENDUKUNG	ANGGARAN Rp.
1	Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	677,500,000
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,293,012,573

				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	6,416,842,500
--	--	--	--	--	---------------

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Merupakan Ukuran Keberhasilan yang menggambarkan Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut:

Table 2.3

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	FORMULA	TARGET
Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	$\frac{\text{Jumlah Konflik yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah Konflik yang Terjadi}} * 100$	98

2.4. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Merupakan Penjabaran atau Turunan dari dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 ini juga merupakan gambaran kegiatan dan output Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow yang di laksanakan dan dicapai pada tahun 2025. Untuk lebih jelasnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat di lihat pada table berikut:

Tabel 2.4
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

<i>SASARAN STRATEGIS</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i>	<i>TARGET</i>
Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Banyak metode atau cara yang dapat digunakan dalam mengukur sejauhmana capaian kinerja OPD, salah satunya dengan membandingkan antara realisasi dan target yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran. Semakin tinggi persentase perbandingan antara realisasi dengan target, maka semakin tinggi pula capaian kinerjanya. Seberapa besar capaian indikator sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, akan dapat dilihat dari seberapa persen rasio antara realisasi dan target yang terdapat pada masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

3.1.2 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan dengan melihat indikator kinerja pada level sasaran tahun 2025. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Dalam rangka pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa program atau kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, Pengukuran kinerja tahun 2025 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

- a). Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- b). Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), di mana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK).

3.1.3 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

>85	= Sangat berhasil
70 < X ≤ 85	= Berhasil
55 < X ≤ 70	= Cukup Berhasil
≤55	= Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**". Penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai *mean* (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator kinerja sasaran yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator Setiap Kategori} \times \text{Nilai Mean Setiap Kategori}}{\text{Jumlah Indikator Kinerja Sasaran}}$$

Nilai **mean** setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Sangat Berhasil	: 92,5
Berhasil	: 77,5
Cukup Berhasil	: 62,5
Tidak Berhasil	: 27,5

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

3.1.2. PENGUKURAN TINGKAT PENCAPAIAN SASARAN

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya persentase penyelesaian konflik Sosial dengan indikator kinerjanya menunjukkan bahwa pada tahun 2025 pencapaian kinerja sasaran tersebut sebesar 98%.

Selengkapnya hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis tersebut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98%

FORKOPIMDA dalam rangka koordinasi terkait pencegahan dan penanggulangan potensi konflik di Kabupaten Bolaang Mongondow





Dalam tahun 2025, potensi – potensi konflik sosial sudah dapat cepat di antisipasi dengan adanya deteksi dini dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan instansi terkait , sehingga tercipta tercipta hubungan yang cukup harmonis dari warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan antar golongan. Ini tergambar dari kurangnya kasus konflik soial yang terjadi di tengah Masyarakat. Suasana yang kondusif ini memudahkan pemerintah daerah untuk menjalankan program -program pembangunan daerah. Pemerintah Bolaang Mongondow melalui Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab untuk berkoordinasi dan membina organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan agar situasi yang kondusif ini terus terjaga.

1. Indikator Persentase Penyelesaian Konflik Sosial

Pengukuran capaian Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Konflik Sosial diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Persentase Penyelesaian Konflik Sosial} &= \frac{\text{Jumlah Konflik yang dapat ditangani}}{\text{Jumlah Konflik yang Terjadi}} * 100 \\ &= \frac{1}{1} \times 100 \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

a. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

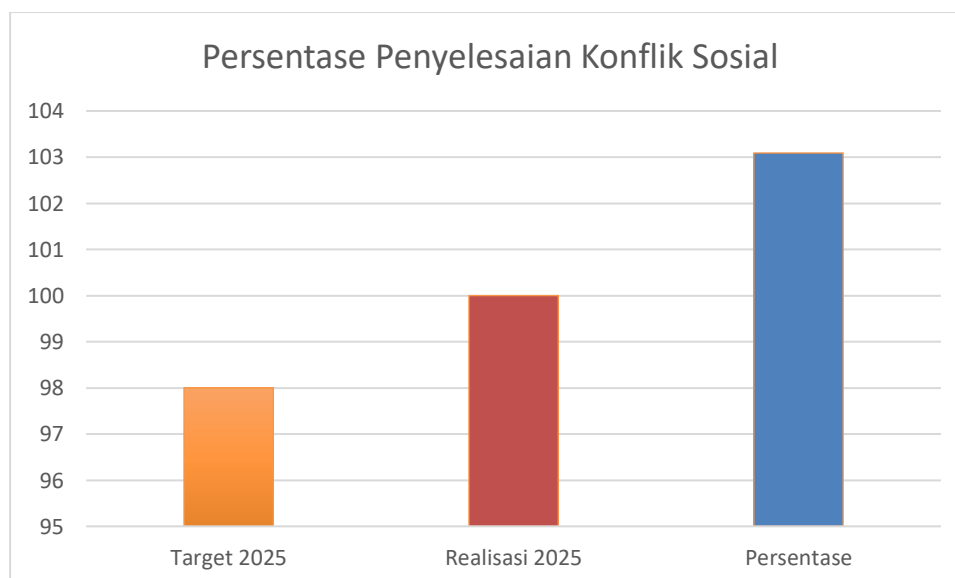
Perbandingan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator **Persentase penyelesaian konflik Sosial** Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.1
Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase penyelesaian konflik sosial Tahun 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2025		
	Target	Realisasi	%
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98	100	103.09

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa indikator **Persentase penyelesaian konflik sosial** dari Target 98 terealisasi 100 dengan capaian kinerja 103.09%

Grafik. 1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2025



b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap Indikator Persentase

penyelesaian konflik sosial Tahun 2024 dan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase penyelesaian konflik sosial Tahun 2024 dan 2025

Indikator Kinerja	Tahun 2024			Tahun 2025			Target Akhir Renstra	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	97	100	104	98	100	104	99	101.01

Berdasarkan tabel diatas indikator Persentase penyelesaian Konflik Sosial pada tahun 2025 dari target 98% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 103,09%, dibandingkan dengan tahun 2024 Tidak ada kenaikan capaian kinerja. Dan capaian kinerja terhadap target akhir renstra sebesar 101.01%. capaian tersebut dapat dilihat juga dalam grafik dibawah ini:

Grafik. 2
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2024 dan Tahun 2025



c. Capaian Kinerja Terhadap Renstra

Adapun perbandingan capain indikator Persentase penyelesaian konflik

Sosial Tahun 2023 – 2026 terhadap target akhir Renstra dapat kita lihat pada tabel berikut :

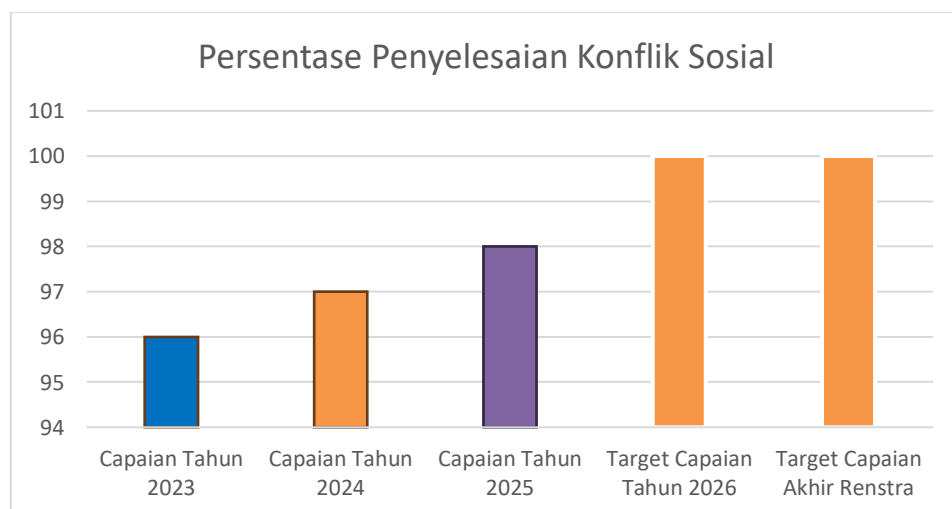
Tabel. 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Persentase penyelesaian konflik Sosial Tahun 2023 s/d 2026

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Capaian Tahun 2025	Target Capaian Tahun 2026	Target Capaian Akhir Renstra
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	96	97	98	100	100

Berdasarkan tabel diatas Capaian indikator Persentase Penyelesaian konflik Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow selama 3 Tahun terakhir tida ada kenaikan secara signifikan,dapat dilihat tabel diatas pada tahun 2025 mencapai 100%, dibandingkan dengan tahun 2024 *Persentase penyelesaian konflik sosial* mencapai 100% dan dibandingkan dengan Tahun 2023 mencapai 100% tidak ada kenaikan ataupun penurunan kinerja dan capaian kinerja tahun periode Tahun 2023 - 2025.

Persentase penyelesaian konflik Sosial 3 Tahun Terakhir dapat juga kita lihat pada grafik berikut :

Grafik 3
Indikator Persentase penyelesaian konflik sosial
Tahun 2023 s/d Tahun 2026



d. Perbandingan Capaian Indikator Persentase penyelesaian konflik sosial di Tingkat Kota, Kabupaten, dan Provinsi

Capaian Persentase penyelesaian konflik sosial Kabupaten Bolaang Mongondow dibandingkan dengan capaian di tingkat Provinsi Sulawesi Utara dan Kota lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.4
Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian konflik sosial di Tingkat Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2025.

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025		
	KABUPATEN BOL.MONG	PROVINSI	KOTAMOBAGU
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	100	100%	99%

Sumber Data :Kesbangpolda Sulut

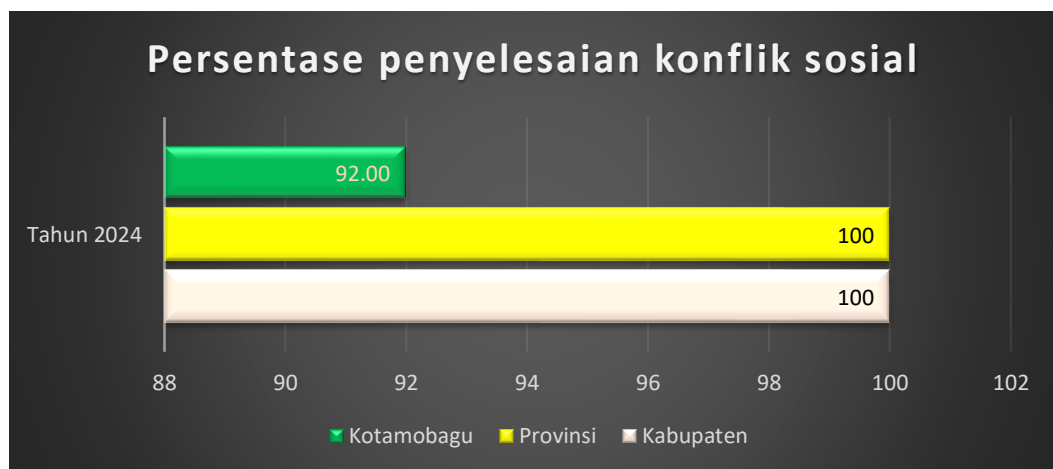
**Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
KESBANGPOLDA SULUT**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2025	REALISASI TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Kasus Trantibum yang terselesaikan (Jumlah Kasus Trantibum yang terdata / jumlah Kasus Trantibum yang terselesaikan x 100%)	100%	100%

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 untuk Kasus Trantibum berdasarkan data yang dihimpun, terjadi tren kenaikan kasus Kantrantibmas di Sulawesi Utara selama Tahun 2025, jika dibandingkan tahun 2024. Data Kriminalitas tahun 2025 berjumlah 8.716 kasus dan tahun 2025 berjumlah 7.521 kasus, tren naik sebesar 1.338 kasus atau 22% sedangkan jumlah penyelesaian kasus tahun 2025 berjumlah 6.031 kasus dan tahun 2024 berjumlah 3.325 kasus, terjadi penurunan sebesar 15,6%.

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian Indikator Kinerja Persentase penyelesaian konflik sosial di Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2025 sebesar 100%. Sedangkan di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 100%, dan Untuk Persentase Persentase penyelesaian konflik sosial di Kota Kotamobagu 100%. Dapat juga dilihat pada Grafik Berikut :

Grafik 4
Capaian Indikator Persentase penyelesaian konflik sosial di tingkat Kabupaten, Provinsi Tahun 2025



3.2. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATAIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Secara umum capaian kinerja indikator Persentase penyelesaian konflik sosial tahun 2025 sebesar 104% dapat dikatakan **“Sangat Berhasil”** hal ini disebabkan :

Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik berhasil mencapai **100% penyelesaian konflik sosial** pada tahun 2025, melebihi target yang ditetapkan sebesar **98%**. Capaian ini menunjukkan efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial dan menciptakan stabilitas di masyarakat.

Analisis Penyebab Keberhasilan

1. Peningkatan Koordinasi Antar Pihak Terkait

- Pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), tokoh masyarakat,

dan organisasi keagamaan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik melalui pendekatan kolaboratif.

2. Efektivitas Mediasi dan Dialog Sosial

- Pendekatan persuasif dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah, dialog antar kelompok, serta keterlibatan tokoh adat dan agama sangat efektif dalam meredam potensi konflik.

3. Respons Cepat dalam Penanganan Konflik

- Mekanisme deteksi dini melalui pemantauan keamanan dan sosial dilakukan dengan baik sehingga konflik dapat dicegah sebelum berkembang menjadi lebih besar.

4. Program Sosialisasi dan Edukasi Perdamaian

- Pemerintah aktif mengadakan sosialisasi tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan hidup berdampingan secara harmonis di masyarakat.

5. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Penanganan Konflik

- Adanya kebijakan daerah yang mendukung penyelesaian konflik sosial secara cepat dan efektif, termasuk penerapan sanksi bagi pihak yang memicu konflik.

6. Peran Aktif Masyarakat dan Lembaga Sosial

- Masyarakat semakin sadar akan pentingnya penyelesaian konflik secara damai melalui jalur hukum dan musyawarah, bukan dengan cara anarkis atau kekerasan.

Alternatif Solusi yang Telah atau Dapat Dilakukan untuk Mempertahankan Capaian

1. Penguatan Sistem Deteksi Dini dan Pencegahan Konflik

- Memanfaatkan teknologi informasi untuk pemantauan konflik sosial melalui platform digital dan media sosial.
- Meningkatkan peran intelijen sosial dan komunitas dalam memberikan laporan dini terhadap potensi konflik.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparat dan Mediator Konflik

- Melakukan pelatihan bagi aparat desa, tokoh masyarakat, dan mediator konflik dalam teknik penyelesaian konflik berbasis negosiasi dan mediasi.

3. Pengembangan Forum Komunikasi Antar Masyarakat

- Membentuk atau memperkuat forum dialog yang melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kelompok pemuda untuk mencegah potensi konflik sosial.
4. **Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**
- Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan sosial sebagai langkah preventif untuk mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketimpangan sosial dan ekonomi.
5. **Sosialisasi Berkelanjutan tentang Harmoni Sosial**
- Menjalankan program edukasi berkelanjutan di sekolah, komunitas, dan lembaga sosial tentang nilai-nilai keberagaman dan pentingnya hidup rukun.

Dengan langkah-langkah tersebut, Kabupaten Bolaang Mongondow dapat terus mempertahankan **100% penyelesaian konflik sosial**, memastikan lingkungan yang aman, harmonis, dan kondusif bagi pembangunan daerah.

3.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tingkat Efisiensi pada indikator Persentase penyelesaian konflik sosial mencapai 99,53% tingginya capaian ini disebabkan karena Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial pada tahun 2025 di dukung oleh anggaran yang memadai yakni sebesar Rp.79,900,000,00 pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Sub Kegiatan Pelaksanaan KEBIJAKAN di Bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di Daerah

Tabel 3.5
Tabel tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN Kinerja	Capaian Anggaran	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial	98	94.60	3,4%

3.4 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILANATAUPUN KEGAGALAN

Pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yang mendukung indikator kinerja ***Persentase penyelesaian konflik sosial*** di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2025, hal ini disebabkan didukung dengan adanya pagu anggaran.

1.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk DPPA-SKPD tahun 2025 dengan rencana dan realisasi anggaran sebagai berikut:

4.2.1 Anggaran dan Realisasi APBD

Tahun Anggaran 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bolaang Mongondow Mendapatkan Alokasi Dana Sebesar

Rp.11,653,127,037,00 (Sebelas milyar enam ratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga puluh tujuh Rupiah) yang terbagi atas belanja Pegawai sebesar Rp.2,290,244,233,- (Dua milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga Rupiah) , Belanja Hibah sebesar Rp.4,766,842,500,- (Empat milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus Rupiah). Belanja barang dan jasa Rp.4,052,793,795,-(Empat milyar lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah). Dari Jumlah dana tersebut anggaran yang dapat diserap secara keseluruhan sebesar Rp 11,023,702,551,- (Sebelas milyar dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah Rupiah) dengan pencapaian presentase sebesar 98,01%, adapun Tahun 2024 pencapaian belanja Operasi sebesar Rp. 66,643,916,310,- (Enam puluh enam milyar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus sepuluh Rupiah). Dalam hal ini tingkat keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bolaang Mongondow dapat dilihat dari penggunaan anggaran dan prosentase capaian secara keseluruhan.

Perbandingan realisasi anggaran APBDP Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2024 dan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1. di bawah:

Tabel. 3.2.1.
Perbandingan Capaian Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Jenis Belanja	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
Belanja Operasi	20.207.815.636	19.611.693.292	97.05	11.653.127.037	11.023.702.551	98.01
Belanja Pegawai	1.862.485.295	1.837.286.244	98.65	2.290.244.233	2.220.218.833	96.94
Belanja Hibah	13.085.378.600	13.055.378.600	99.77	4.766.842.500	4.727.640.000	99.18
Belanja Barang dan Jasa	5.259.951.741	4.719.028.448	<u>89.72</u>	4.052.793.795	3.940.722.783	<u>97.23</u>
Belanja Modal	0	0	<u>0</u>	543.246.509	135.120.935	<u>24.87</u>
Jumlah	20.207.815.636	19.611.693.292	97,05	11.653.127.037	<u>11.023.702.551</u>	<u>98.01</u>

3.2.1. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan

Capaian kinerja pada realisasi anggaran untuk masing-masing program/kegiatan ditunjukkan seperti pada Tabel 3.2.2 dibawah:

Tabel.3.2.2
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Capaian Realisasi anggaran Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUMBER DANA	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	KET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DAU	3.265.771.964	3.263.771.964	99.9	
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	DAU	2.336.654.346	2.265.394.721	96.95	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	2.281.244.233	2.213.368.833	97.02	
-	Pelaksanaan penatausahaan Keuangan SKPD	DAU	36.469.315	34.187.786	93.74	
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	18.940.798	17.838.102	94.18	
2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	DAU	235.336.000,00	235.096.964,00	99,90	

-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	235.336.000,00	235.096.964,00	99,90	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	97.000.000	92.500.000	95,36	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	97.000.000	92.500.000	95,36	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DAU	51.535.109	36.231.401	70,30	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	DAU	49.035.109	34.161.400	69,67	
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	DAU	1.293.012.573	1.248.951.565	96,59	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	DAU	1.293.012.573,00	1.248.951.565,00	96,59	
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	DAU	6.416.842.500,00	6.371.881.965,00	99,30	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	DAU	6.416.842.500,00	6.371.881.965,00	99,30	
IV	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAANNASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	DAU	677.500.000,00	638.525.000,00	94,25	
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	DAU	677.500.000,00	638.525.000,00	94,25	
-	Pelaksanaan KEBIJAKAN di Bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di Daerah	DAU	79.900.000,00	79.075.000,00	98,97	
-	Pelaksanaan Monitoring,evaluasi dan Pelaporandi Bidang kewaspadaan dini,Kerjasama intelijen,pemantauan orang asing,tenaga kerja asing dan Lembaga asing,kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,serta penanganan konflik di Daerah	DAU	597.600.000,00	559.450.000,00	93,62	
Jumlah			11.653.127.037,00	11.023.702.551,00	94,60	

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan capaian realisasi kinerja keuangan antara lain :

3.3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Merupakan Program Intern yang target dan tujuannya ke dalam SKPD dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun kegiatannya adalah:

- a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, total anggaran sebesar **Rp. 1.862.485.295,-** dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut :
 - *Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan dana* **Rp. 2.281.244.233 dan Realisasi Rp. 2.213.368.833 (97.60%)**
 - *Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD* **Rp. 36.469.315 dan realisasi Rp. 34.187.786 (93.74%)**
 - *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan dana* **Rp. 18.940.798,- dan realisasi Rp.17.838.102,- (94,18%)**
- b. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, total anggaran sebesar **Rp. 235.336.000,00** dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut :
 - *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan dana* **Rp. 235.336.000 dan realisasi Rp. 235.096.964 (99.90%)**
- c. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, total anggaran sebesar **Rp. 97.000.000** dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut :
 - *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan dana* **Rp. 97.000.000 dan realisasi Rp 92.500.000 (95.36%)**
- d. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, total anggaran sebesar **Rp. 51.535.109** dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut:

- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak, kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan dana **Rp. 49.035.109** dan realisasi **Rp. 34.161.400** (69.67%) dan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya **Rp. 2.500.000,-** realisasi **Rp. 2.070.001** (82.80%)*

3.4. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL *Merupakan Program Ekstern yang target dan tujuannya ke luar SKPD atau program kerakyatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun kegiatannya adalah :*

- a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, total anggaran sebesar **Rp. 677.500.000,-** dengan rincian Sub kegiatan sebagai berikut

Proses Pelaksanaan KEBIJAKAN di Bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah. berdasarkan Klaster Kompetensi dengan dan **Rp. 79.900.000,-** dan realisasi **Rp. 79.075.000,-** (98.97%) dan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan di Bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah Dengan anggaran sebesar **Rp. 597.600.000,-** dan realisasi **Rp. 559.450.000,-** (93.62%).

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban serta sarana penyampaian informasi tentang sejauh mana capaian kinerja tahunan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 maupun di dalam RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2026 - 2029 yang diamanahkan masyarakat dan pimpinan di atasnya.

5.1. KESIMPULAN ATAS CAPAIAN KERJA ORGANISASI

Berdasarkan capaian kinerja organisasi pada Bab III di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2025 pada sasaran 1 **Meningkatnya persentase penyelesaian konflik sosial** dengan indikator sasaran *penyelesaian konflik sosial*, capaian **“Sangat Berhasil”**,

Sedangkan untuk realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp. 638.525.000,- mencapai 94.25%,

5.2. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun mendatang ada beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain :

1. Mengusulkan kembali kegiatan – kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun – tahun sebelumnya, untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow 2026 – 2029
2. Meningkatkan pemantauan, Pembinaan melalui program kegiatan serta

pendekatan sehingga diharapkan adanya informasi timbal balik dari Masyarakat, ormas dan LSM

3. Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat mengenai program – program yang berkaitan dengan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan potensi dan kompetensi.

